

ABSTRAK

(Ivan Rian), 2022, Analisis Partisipasi Masyarakat Menuju desa Tangguh Bencana di Kawasan Terdampak Lumpur Lapindo, Tugas Akhir, Program Studi: Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Dosen Pembimbing : Moch. Shofwan, S.Pd., M.Sc.

Tragedi lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo terjadi hampir 16 tahun tepat pada tanggal 29 Mei 2006 sampai sekarang, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berhenti. Semburan lumpur tersebut diduga berawal dari keluarnya asap kebocoran pipa dari pengeboran PT Lapindo Brantas. Hal itu menjadi awal bencana yang terus berkelanjutan hingga menenggelamkan beberapa desa antara lain Renokenongo, Siring, Jatirejo, Glagaharum, Kedungbendo, ketapang, Besuki. Beberapa desa yang dekat dengan wilayah semburan lumpur pun juga ikut terkena imbasnya yakni munculnya semburan lumpur baru, semburan air, semburan gas beracun, tanah amblas yang mengakibatkan kerusan rumah dan fasilitas umum, tercemarnya sumber air, serta tersumbatnya saluran irigasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan desa dalam pengelolaan risiko bencana dan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat menuju desa Tangguh bencana di Kawasan terdampak lumpur lapindo. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah kebijakan desa dalam pengelolaan risiko bencana di Kawasan terdampak lumpur Lapindo bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan oleh 3 kecamatan yang terdampak yaitu Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon telah dilaksanakan dengan efektif seperti pembangunan tanggul guna mencegah terjadinya luapan lumpur agar tidak melebar ke permukiman warga disekitarnya. Desa-desa di sekitar Kawasan lumpur yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon telah menerapkan regulasi berupa Perdes dan dengan adanya regulasi di beberapa jalan desa. Namun pada desa-desa yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Jabon belum tersedianya jalur evakuasi di sekitar permukiman warga tetapi jalur evakuasi hanya tersedia di kantor desa. Dalam mekanisme peringatan bencana desa menggunakan toa/speaker yang dinilai lebih bisa memberi informasi ke masyarakat dengan jelas daripada kentongan dan masyarakat dapat menerima informasi dengan jelas bila menggunakan speaker. bentuk partisipasi masyarakat menuju desa Tangguh bencana dikawasan terdampak lumpur Lapindo tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan *citizen power (partnership)* Hal ini terjadi karena total 8 indikator, sebanyak 4 indikator berada pada level 6 (*Partnership*). Nilai tersebut lebih banyak dibandingkan dengan level pada indikator lainnya. Pada tingkatan ini bentuk partisipasi masyarakat berupa pemerintah desa memberlakukan masyarakat sebagai partner kerja bersama-sama dalam Menyusun dan melaksanakan program kerja untuk desa.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, penanggulangan bencana, risiko bencana

ABSTRACT

(Ivan Rian), 2022, Analysis of Community Participation Towards Disaster Resilient Villages in Lapindo Mud Affected Areas, Final Project, Study Program: Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, PGRI Adibuana University Surabaya, Supervisor : Moch. Shofwan, S.Pd., M.Sc.

The Lapindo Mud Tragedy in Sidoarjo Regency occurred almost 16 years ago on May 29, 2006 until now, but until now there is no sign that it will stop. The mudflow is thought to have started from smoke from a pipe leak from the PT Lapindo Brantas drilling rig. This was the beginning of a continuous disaster that drowned several villages including Renokenongo, Siring, Jatirejo, Glagaharum, Kedungbendo, Ketapang, Besuki. Several villages close to the mudflow area were also affected, namely the emergence of new mudflows, water jets, toxic gas sprays, land subsidence resulting in damage to houses and public facilities, contamination of water sources, and clogged irrigation channels. So it is necessary to know the Form of Community Participation Towards a Disaster Resilient Village in the Lapindo Mud Affected Area. This study uses primary and secondary data collection methods and uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques in the form of field observations and interviews. The results of this study are village policies in disaster risk management in the Lapindo mudflow affected area that disaster management carried out by 3 affected districts namely Tanggulangin District, Porong District, Jabon District has been carried out effectively such as the construction of embankments to prevent mudflow from spreading to the ground. the surrounding settlements. Villages around the mud area have also implemented regulations in the form of a village regulation such as the Village Regulation of Gempolsari, Tanggulangin District number 8 of 2020 concerning the village income and expenditure budget, article 5 and the existence of regulations on several village roads. However, there is no evacuation route in the vicinity of residential areas, so that residents will be confused in the event of a disaster where to evacuate, but evacuation routes are only available at the village office. In the village disaster warning mechanism, the use of toa/speakers is considered to be more able to provide information to the community clearly than kentongan and the community can receive information clearly when using speakers. a form of community participation towards the disaster-resilient village in the area affected by the Lapindo mudflow. The level of community participation is at the citizen power (partnership) level because the community is starting to become aware of the disaster-resilient village program so that they can participate voluntarily

Keywords: community participation, disaster management, disaster risk